

**PERANCANGAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS*
PENYULUHAN BAGI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PERDESAAN DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

***DESIGNING KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS FOR EXTENSION
RURAL COMMUNITY RESILIENCE ACTIVATORS IN THE MINISTRY OF
VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS AND
TRANSMIGRATION***

Priyono ^{1*}, Chamidun Daim ²

Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

*priyohamidjodjo@gmail.com

ABSTRAK

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) adalah pegawai negeri sipil dengan kompetensi khusus melaksanakan tugas utama menggerakkan masyarakat perdesaan Indonesia melalui kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa peran PSM masih belum terlaksana optimal antara lain karena belum adanya manajemen pengetahuan bidang pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan tersebut. Pengkajian dilakukan bulan April-Mei 2021 bertujuan mengkaji perancangan knowledge management systems (KMS) untuk mengoptimalkan peran kegiatan penyuluhan bagi PSM di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDRT). Metodologi yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dan studi pustaka guna pengkajian lebih lanjut terhadap rancangan rancangan pengembangan KMS bidang penyuluhan bagi PSM. Hasil penelitian berupa kajian rancangan KMS yang sesuai untuk dapat dimanfaatkan PSM dalam mengoptimalkan tugas pokok pergerakan dan pemberdayaan melalui penyuluhan masyarakat. Proses penciptaan pengetahuan baru untuk memenuhi kompetensi PSM bidang penyuluhan masyarakat menggunakan model SECI, dan enam siklus manajemen pengetahuan.

Kata kunci: Knowledge Management Systems, Penggerak Swadaya Masyarakat, Tacit dan Explicit Knowledge Penyuluhan Masyarakat,

ABSTRACT

Rural Community Resilience Activators (RCRA) as civil service servants within the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Ministry of Village, DDRT), with the specific competence and main task of the, included rural counseling, extension, and community training. The RCRA's role and function have not been functioned optimally due to the absence of knowledge management in the field of counseling, extension, and community training. This assessment research has been conducted in April-May 2021, with the research aims to assess the design of knowledge management systems (KMS) to support optimal function of the RCRA in implementing activation and empowerment of Indonesian communities for the existence of developed and self-reliance villages as one priority mission of the Ministry of Village, DDRT. The methodology used on this assessment is descriptive qualitative research, collecting data, relevant documents, and literature reviews related to Knowledge Management Systems (KMS) for the empowerment of rural communities in Indonesia. This assessment has resulted in a design concept of Information Technology-based KMS for rural extension supported optimal role of the Rural Community Resilience Activator in accelerating village development in Indonesia.

Keywords: Knowledge Management Systems, Rural Community Resilience Activator, Rural Extension Tacit and Explicit Knowledge

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa didukung sumber daya manusia yang handal termasuk Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), yang sampai tahun 2019 tercatat 444 orang. Penugasan PSM tersebar di unit instansi tingkat pusat, provinsi serta kelurahan. Kementerian Desa, PDTT, termasuk di Kementerian /Lembaga lain. Dalam hal ini Kementerian Desa, PDTT berfungsi sebagai instansi pembinaan karir jabatan PSM.

Ketentuan tugas pokok dan fungsi PSM diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 28 Tahun 2018, ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa, PDTT) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kompetensi pejabat fungsional PSM. Tugas utama dan pendampingan PSM sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri tersebut meliputi pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan yang pelaksanaan di lapangan, dikerjakan bersama mitra kader masyarakat desa dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk tugas terkait penyuluhan di lapangan, PSM juga bersinergi kerja sama penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan/ Keluarga Berencana, kelompok tani, serta kader penggerak lainnya.

Dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa PSM belum berperan optimal untuk menghasilkan peningkatan pemberdayaan yang berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Sutarto & Mulyono (2018), peran dan fungsi PSM sebagai mitra yang juga memiliki fungsi pendampingan masyarakat dapat melengkapi tugas pendampingan seluruh desa wilayah Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Di lingkungan Lembaga pelatihan khususnya Balai Pelatihan Masyarakat di beberapa daerah masih belum memprioritaskan program pendampingan ini karena masih merupakan kegiatan baru.

Hanafie, N.E (2020) dalam penelitiannya mengindikasikan PSM belum berfungsi optimal melaksanakan

pendampingan, penyuluhan dan pelatihan masyarakat karena terkendala PSM ditugaskan pada unit kerja yang tidak memiliki tugas pokok pemberdayaan masyarakat; kurangnya komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan keberadaan PSM; terbatasnya kapasitas PSM di semua jenjang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

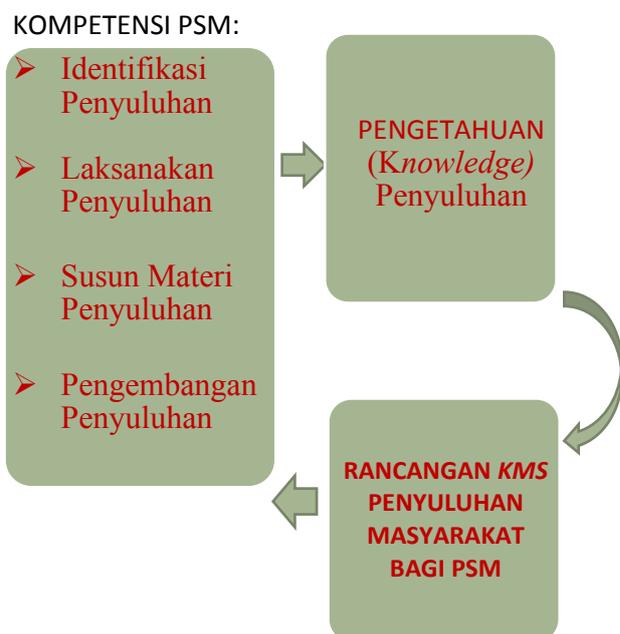
Kapasitas PSM untuk memenuhi kompetensi pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan masyarakat menunjukkan perlunya pengetahuan bagi PSM sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan, utamanya menyangkut pengetahuan teori dan praktik di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan peran PSM dalam tugas penggerakan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pengelolaan pengetahuan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui pengembangan *Knowledge Management Systems* bagi PSM.

Mengingat sangat luasnya cakupan tugas PSM dalam pemberdayaan dan penggerakan masyarakat, maka ruang lingkup dalam penelitian pengkajian ini dibatasi pengembangan KMS hanya terfokus pada penyuluhan masyarakat. Guna memperoleh gambaran rancangan KMS yang sesuai untuk bidang penyuluhan PSM, dianalisis dan dikaji perkembangan KMS dari segi teori dan praktik implementasinya.

Knowledge Management Systems dapat diusulkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat PSM dalam penggerakan swadaya masyarakat desa. Kegiatan penyuluhan meliputi identifikasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, penyusunan materi penyuluhan, dan pengembangan penyuluhan. Peran penyuluhan dari pejabat PSM tidak dapat optimal tanpa adanya pengetahuan penyuluhan baik pengetahuan yang diperoleh dari mempelajari teori maupun belajar pengalaman di lapangan.

Proses perancangan KMS bidang penyuluhan masyarakat bagi PSM dapat disajikan pada Gambar1 berikut:



Gambar 1. Proses Perancangan KMS Penyuluhan Bagi PSM

(Sumber: Berdasarkan Pengkajian Rancangan KMS untuk Penyuluhan Masyarakat)

Bagan di atas menggambarkan bahwa pejabat fungsional PSM dan pihak mitra yang terlibat dalam penggerakan swadaya masyarakat di level pusat, pemerintah daerah dan desa memerlukan peran penyuluhan, baik bidang penyuluhan meliputi penyuluhan pertanian, pendidikan, Kesehatan, dan penyuluhan masyarakat perdesaan lainnya.

Dengan rancangan model sistem KMS di atas, diharapkan dapat ditingkatkan peran penggerak swadaya masyarakat, tersedianya pengetahuan penyuluhan yang dapat diakses dan dimanfaatkan bersama oleh PSM dan pihak yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan masyarakat untuk mendorong perwujudan masyarakat desa maju dan mandiri.

Tujuan pengkajian KMS bidang penyuluhan masyarakat ini adalah :

- (1). Menelaah dan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan penguatan kompetensi untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok PSM
- (2). Mereviu perkembangan konsep, teori , dan pengimplementasian KMS;
- (3). Mengkaji rancangan pengembangan KMS bidang Penyuluhan bagi PSM.

Hasil kajian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam pengembangan KMS untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja, khususnya mengoptimalkan peran SDM bidang penggerak swadaya masyarakat perdesaan di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian/ pengkajian ini menerapkan metode kualitatif. Menurut Creswell (2016), metode kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, serta menafsirkan makna data.

Tahapan diawali dengan mengidentifikasi kurang optimalnya peran PSM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dari identifikasi salah satu faktor kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena kurangnya kapasitas untuk memenuhi kompetensi PSM dikaitkan dengan tugas pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan masyarakat. Untuk memenuhi kompetensi dasar dan dapat melaksanakan tugas pokok penyuluhan masyarakat, PSM harus memiliki pengetahuan memadai, baik pengetahuan *tacit* mau pun pengetahuan eksplisit. Kebutuhan pengetahuan (*knowledge*) untuk memenuhi kompetensi PSM digali lebih lanjut dari uraian tugas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Mengingat luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi untuk diperankan oleh PSM, dalam pengkajian ini difokuskan kepada upaya optimalisasi penyuluhan masyarakat

Pengumpulan data, review dokumen terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi dan sasaran kinerja PSM dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Menteri dan dokumen peraturan terkait lainnya. Pengumpulan data juga diperoleh dari

kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan untuk penyetaraan dalam jabatan PSM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian/ kajian berupa rancangan KMS yang sesuai untuk dapat dimanfaatkan PSM dalam mengoptimalkan tugas pokok penggerakan dan pemberdayaan melalui penyuluhan masyarakat. Proses penciptaan pengetahuan baru untuk memenuhi kompetensi bidang penyuluhan masyarakat menggunakan model SECI..

Kajian atas rancangan pengembangan KMS penyuluhan PSM, meliputi identifikasi kebutuhan kompetensi keahlian minimal yang dimiliki oleh PSM (jenjang fungsional PSM ahli), yakni kemampuan melakukan : (i) Identifikasi penyuluhan, (ii) Melaksanakan Penyuluhan, (iii). Menyusun materi penyuluhan , dan (iv). Pengembangan penyuluhan. Berdasarkan kompetensi dasar dikaji dan dianalisis lebih lanjut kebutuhan pengetahuan (pengetahuan *tacit* dan pengetahuan *eksplisit*) yang harus dimiliki PSM. Implementasi rancangan KMS yang sesuai berdampak kepada meningkatnya peran PSM ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan secara optimal membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan untuk mengubah pengetahuan *tacit* pelatih bidang penyuluhan menjadi pengetahuan *tacit* pejabat PSM.

Tahapan *externalization* merupakan proses yang bertujuan untuk mengartikulasi *tacit knowledge* menjadi suatu konsep yang jelas atau eksplisit melalui proses dialog dan refleksi. Dukungan terhadap proses eksternalisasi dapat diberikan dengan mendokumentasikan notulen rapat (bentuk eksplisit dari *knowledge* yang tercipta saat diadakannya pertemuan) kedalam bentuk elektronik untuk kemudian disimpan dalam suatu repository dan dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan *knowledge* atau kompetensi karyawan. Lebih lanjut, tahap *combination* yaitu proses mengkombinasikan berbagai

explicit knowledge yang berbeda untuk disusun ke dalam sistem *knowledge management*. Media untuk proses ini dapat melalui forum diskusi, termasuk forum diskusi secara *virtual*.

Proses *knowledge management system* adalah eksternalisasi dan internalisasi. Mengembangkan *knowledge management* sistem bidang penggerakan swadaya masyarakat sebagai berikut:

- a. Proses sosialisasi, diartikan sebagai proses untuk dapat mengubah pengetahuan yang bersifat *tacit* menjadi *tacit* kembali. Proses ini dimaksudkan untuk mempermudah proses komunikasi. Dalam hal ini pejabat PSM dan mitra level pusat sampai desa tidak harus menunggu untuk saling bertemu secara langsung untuk bertanya dan mendiskusikan penyelesaian suatu permasalahan.
- b. Fokus pengkajian, bagaimana mengembangkan budaya *knowledge sharing* antara pejabat PSM dalam meningkatkan kegiatan utama pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan masyarakat perdesaan, serta menyusun disain *knowledge management systems* yang sesuai untuk optimalisasi penggerak swadaya masyarakat perdesaan di Indonesia.

Manfaat yang diharapkan meliputi : (i) penyiapan bahan kajian, menyusun rancangan *knowledge management systems* (KMS) bidang penggerak swadaya masyarakat perdesaan di Indonesia, dan (ii) Mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja pemberdayaan masyarakat desa menuju kemajuan dan kemandirian.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). Menyatakan bahwa sebuah *knowledge* diciptakan melalui interaksi antara pengetahuan *tacit* dan eksplisit. Interaksi tersebut dikemukakan dalam empat fase konversi pengetahuan, yang diilustrasikan pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Asitektur Knowledge Management System Model SECI Nonaka

Sumber : Model SECI Nonaka, Ikujiro dan Takeuchi (1995)

Penjelasan dari model SECI diuraikan sebagai berikut :

Sosialisasi (Socialization), merupakan proses sosialisasi terjadi interaksi sosial antar individu sehingga terjadi interaksi antara pengetahuan *tacit*, umumnya bentuk proses sosialisasi adalah diskusi, cerita, ataupun sharing (berbagi) pengalaman.

Eksternalisasi (externalization), proses pengubahan atau penerjemahan pengetahuan dalam bentuk *tacit* menjadi pengetahuan yang *explicit* (nyata), umumnya dalam bentuk tulisan ataupun gambar.

Kombinasi (combination), proses penyebarluasan dan/atau pengembangan dari pengetahuan-pengetahuan eksplisit yang telah ada. Pengetahuan yang telah terdokumentasikan dapat disebarluaskan melalui suatu pertemuan dalam bentuk dokumen ataupun melalui suatu proses pendidikan atau pelatihan.

Internalisasi (internalization), proses perubahan pengetahuan *explicit* menjadi pengetahuan *tacit*, umum dilakukan melalui

proses belajar dan/atau penelitian yang dilakukan ataupun pengalaman yang dilalui oleh setiap individu.

Knowledge sharing, adalah proses yang sistematis dalam mengirimkan, mendistribusikan dan mendiseminasikan pengetahuan dan konteks multidimensi dari seseorang atau organisasi kepada orang atau organisasi lain yang membutuhkan melalui metode dan media yang variatif.

Pengetahuan baru timbul karena adanya interaksi secara terus menerus antara pengetahuan *explicit* (teraktualisasi) dan *tacit* (terpendam)”. Dari aplikasi *knowledge management* yang didukung aplikasi sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah yang dapat memfasilitasi pergerakan swadaya masyarakat perdesaan untuk melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman bidang penyuluhan masyarakat. review hasil observasi lapangan para pejabat PSM wadah untuk diskusi antara pejabat PSM Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Desa PDPT, mitra *stakeholders* pemerintah daerah dan desa.

Penerapan model SECI terkait pengembangan KMS bidang penyuluhan menyangkut *tacit* dan *explicit knowledge* dari uraian kompetensi PSM sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan masyarakat adalah *explicit knowledge*.
- 2) Melaksanakan penyuluhan memerlukan *tacit knowledge* dan *explicit knowledge* (lebih *dominan tacit knowledge*)
- 3) Menyusun materi penyuluhan perlu *tacit* dan *explicit knowledge* (lebih *dominan k explicit knowledge*)
- 4) Melakukan pengembangan penyuluhan lebih *dominan tacit knowledge*.

Ada empat model SECI, yaitu:

- 1) Dari *tacit* ke *tacit* melalui proses sosialisasi untuk mendapatkan *tacit knowledge*. Dalam hal ini sosialisasi melalui berbagi pengalaman, magang kerja, atau praktik lapangan
- 2) Dari *tacit* ke *explicit* melalui eksternalisasi
- 3) Dari *explicit* ke *explicit* melalui kombinasi, dan
- 4) Dari *explicit* ke *tacit* melalui internalisasi.

Konsepsi pengembangan *KMS Help Desk* Penyuluh Pertanian menurut Harisno dan Freddy Jingga (2011), dimaksudkan mengatasi permasalahan : (i) tidak terdokumentasinya dengan baik *knowledge* penyuluhan pertanian sehingga rentan kehilangan *knowledge*, (ii) panjangnya jalur distribusi sehingga menyebabkan kelambatan penyampaian *knowledge* penyuluhan, (iii) kesulitan para penyuluh pertanian menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para pelaku utama atau pelaku usaha pertanian karena kurang acuan referensi; (iv) keterbatasan tempat dan waktu berdiskusi sehingga pengembangan *knowledge* penyuluhan lambat; (v). kesulitan mengidentifikasi *knowledge* penyuluhan pertanian dan informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di lapangan., (vi). Masalah pelaku utama dan pelaku usaha dan pertanyaan yang diajukan di lapangan tidak terdokumentasi dengan baik.

Solusinya melalui pengembangan sistem *Help Desk* Penyuluhan Pertanian untuk mengatasi permasalahan : (1) *Sistem dapat menangani dokumentasi knowledge penyuluhan pertanian yang ada pada Departemen Pertanian sehingga aset intelektual yang berupa knowledge penyuluhan pertanian yang ada tidak hilang*; (2) *Aplikasi yang dikembangkan berbasis web yang dapat diakses dimana dan kapan saja oleh para user yaitu para Penyuluh Pertanian. Sistem berbasis web ini akan memperpendek jalur distribusi atau jalur penyampaian knowledge, memperkecil resiko informasi yang bias ketika disampaikan, memperkecil resiko keterlambatan penyampaian, pengumpulan, dan pengembangan knowledge.*

Manfaat adanya *KMS Help Desk* Penyuluhan Pertanian berbasis *web* dapat mengatasi dengan baik masalah waktu, tempat, dan efisiensi biaya. Sistem dapat menampung dan mengelola *knowledge* sebagai tempat *repository* referensi dalam menjawab pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh para penyuluh pertanian dengan baik dan cepat. Sistem yang dibangun dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi informasi dan *e-knowledge* penyuluhan pertanian baru atau *knowledge* penyuluhan pertanian yang sedang dibutuhkan. *KMS*

memfasilitasi satu media sebagai tempat berdiskusi (*sharing knowledge*), sehingga *knowledge* penyuluhan pertanian yang ada terus berkembang dan dapat diperkaya dengan *knowledge* lainnya yang berasal dari berbagai sumber. Selain itu sistem juga dapat mendokumentasikan masalah atau pertanyaan-pertanyaan dari penyuluh di lapangan.

Anardani, *et al.* (2021), mengusulkan kerangka kerja dengan metode *The 10-Step Knowledge Management Roadmap* dari Tiwana dapat diterapkan pada Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Pelaksanaan pembangunan aplikasi *KMS* sebaiknya mengacu pada *Blueprint* yang telah disusun sehingga dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan.

Hidayat, *et al.* (2019), menyatakan bahwa *KMS* merujuk pada segala hal terkait sistem IT yang dapat menyimpan, menerima pengetahuan, memperbaiki kolaborasi, memudahkan pencarian suatu pengetahuan, menangkap, menggunakan suatu pengetahuan atau dalam hal lain memperbaiki proses dari *knowledge management*. Tujuan yang ingin dicapai pada proyek *KMS* antara adalah memfasilitasi *KM* proses diantaranya : (i) menyediakan *tools* untuk memperoleh dan mendokumentasikan pengetahuan yang sudah diidentifikasi terlebih dahulu; (ii) menjadikan *KMS* sebagai alat kolaborasi dalam berbagi pengetahuan baik melalui forum *online*, *chat*, *Wiki*; (iii) menyediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses dan memperoleh *knowledge* yang dibutuhkan oleh pegawai; (iv) menyediakan aplikasi yang dapat menyimpan dan mengelola pengetahuan dalam bentuk *repository* dokumen; (v) sebagai alat untuk mengevaluasi pengetahuan yang ada, termasuk mengidentifikasi adanya pengetahuan baru.

Assa, *et al.* (2017), penyuluh kelompok tani diartikan kumpulan orang-orang tani atau petani dewasa, petani wanita, tua dan muda, yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Fokus kajian dalam tulisan ini membahas bagaimana proses berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) antara *PSM*

dengan difasilitasi KMS agar peran penyuluhan masyarakat desa dapat dilaksanakan secara optimal.

Sesuai Peraturan Menteri Pemanfaatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No. 28 Tahun 2018, SDM aparatur yang dapat diberdayakan meliputi pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) pegawai negeri sipil yang diberikan amanah jabatan dengan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pergerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional PSM bersinergi bersama mitra SDM agen perubahan di pusat dan daerah bahkan sampai pendamping lokal desa di 74.960 desa di seluruh Indonesia. Pejabat PSM mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pergerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.

Penggerakan swadaya masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.

Kompleksitas dan luasnya cakupan tugas pejabat fungsional PSM, memerlukan fasilitasi ketersediaan sistem agar tugas pokok pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan secara optimal. Tugas pokok pejabat fungsional PSM keahlian terkait bidang penyuluhan, disajikan pada Tabel-1 berikut.

Tabel 1. Kegiatan PSM Ahli di bidang Penyuluhan

Uraian Kegiatan (Unjuk kerja) PSM
1. melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan inovatif;
2. mengumpulkan data bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan;
3. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
4. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
5. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
6. melaksanakan kegiatan diseminasi panduan fasilitasi penyuluhan masyarakat;
7. menyusun materi penyuluhan masyarakat;
8. melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
9. mengembangkan sistem dan metoda penyuluhan masyarakat;
10. menyusun panduan penyuluhan masyarakat;

Sumber : Peraturan Menteri PAN-RB No. 28/ Tahun 2018.

Membangun KMS bertujuan untuk mensinergikan pengetahuan dan keterampilan dalam pergerakan masyarakat. Pengetahuan atau knowledge merupakan hal enting yang harus dikelola dalam hal ini mendukung strategi percepatan pencapaian sasaran mewujudkan desa maju dan mandiri.

Al Gharibeh, (2011) menyatakan bahwa pengetahuan (*knowledge*) memiliki peran penting untuk mendukung budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan *knowledge transfer* sebagai bagian integral dari *knowledge sharing*. Pengetahuan sangat diperlukan agar organisasi dapat berkembang baik, namun kenyataannya sebagian besar

pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi biasanya belum terkelola dengan baik. Manajemen diperlukan untuk mengatur pengembangan aplikasi KMS dalam rangka membangun KMS. Pengetahuan yang telah terkelola dalam KMS dengan mudah dapat diakses dengan cepat dipelihara dengan baik, sehingga dapat diciptakan, dikembangkan, diperbarui dan dimanfaatkan bersama guna mendukung kebutuhan pengembangan organisasi. Pengetahuan juga data dimanfaatkan secara terus menerus untuk keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan organisasi.

Pengetahuan penyuluhan diperlukan untuk memenuhi kompetensi PSM dan unjuk kerja yang diharapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kegiatan dan Hasil Kerja Pejabat PSM Kategori Keahlian

Jenjang Jabatan	Uraian Kegiatan (Unjuk kerja) PSM Keahlian
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1. melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan inovatif; 2. mengumpulkan data bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan;
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda,	1. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat; 2. melaksanakan penyuluhan masyarakat; 3. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya	1. melaksanakan kegiatan diseminasi panduan fasilitasi penyuluhan masyarakat; 2. menyusun materi penyuluhan masyarakat; 3. melaksanakan kegiatan evaluasi

	penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama	1. mengembangkan sistem dan metoda penyuluhan masyarakat; 2. menyusun panduan penyuluhan masyarakat;

Sumber : Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2018

Uraian kegiatan dan unjuk kegiatan masing-masing jenjang jabatan PSM sebagaimana tercantum pada tabel, memerlukan *knowledge* bidang penyuluhan masyarakat yang dapat dengan mudah didiseminasikan kepada pejabat PSM dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Tahap internalisasi pengetahuan penyuluhan kepada masyarakat mengikuti empat tahapan model SECI, sampai diperoleh pengetahuan baru yang paling efektif dan optimal.

Peta kompetensi jabatan terkait bidang kegiatan penyuluhan disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Peta Kompetensi Jabatan PSM Bidang Penyuluhan Masyarakat

No	Kemampuan/ Kompetensi
1	Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan masyarakat
2	Melaksanakan penyuluhan masyarakat
3	Menyusun materi penyuluhan masyarakat
4	Melakukan pengembangan penyuluhan masyarakat

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri DesaPDTT No. 1 Tahun 2020,

Dalam rangka memenuhi kompetensi melalui peningkatan kapasitas jabatan fungsional PSM tersebut, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah menyelenggarakan pelatihan dasar (Latsar) bagi calon pejabat fungsional PSM dalam dua angkatan yaitu Angkatan VIII dimulai 15 Maret 2021 s.d 15 April 2021, dan Latsar

PSM angkatan IX mulai 29 Maret 2021 sampai 28 April 2021. Pelatihan dilaksanakan secara *distance learning*, metoda pelatihan dengan penyampaian materi secara virtual, serta pelaksanaan observasi lapangan secara *blended learning*.

Materi latsar PSM tersebut, meliputi bahan ajar berikut:

- 1) Identifikasi kebutuhan pergerakan
- 2) Pembangunan relasi dan solidaritas sosial
- 3) Manajemen Perubahan
- 4) Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat
- 5) Membangun Jejaring dan Kemitraan
- 6) Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat
- 7) Fasilitasi Penyuluhan
- 8) Fasilitasi Pelatihan, dan
- 9) Fasilitasi Pendampingan masyarakat.

Peran pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat, sehingga terbangun KMS secara holistik dalam mengoptimalkan peran dan fungsi penggerak swadaya masyarakat mendorong perwujudan desa maju dan desa mandiri. Untuk mengoptimalkan pengelolaan pengetahuan, dukungan teknologi sangat diperlukan.

Menurut Harisno, *et al.* (2011), untuk membantu menangani permasalahan penyuluhan pertanian di lapangan, dapat dibangun Sistem *Help Desk* Penyuluhan Pertanian sebagai solusi alternatif, dengan pertimbangan : (1) Sistem dapat menangani dokumentasi *knowledge* penyuluhan pertanian yang ada sehingga aset intelektual yang berupa *knowledge* penyuluhan pertanian yang ada tidak hilang; (2) Aplikasi yang dikembangkan berbasis *web* yang dapat diakses dimana dan kapan saja oleh para *user* yaitu para Penyuluh Pertanian. Sistem berbasis *web* ini akan memperpendek jalur distribusi atau jalur penyampaian *knowledge*, memperkecil risiko informasi yang bias ketika disampaikan, memperkecil risiko keterlambatan penyampaian, pengumpulan, dan pengembangan *knowledge*.

Manajemen data yang ada di dalam database *Knowledge Repository* ini dikelola aplikasi berbasis *web* ini untuk memudahkan para pengguna mengakses data, informasi dan pengetahuan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhannya. Sistem *help desk* penyuluhan

merupakan *knowledge repository* penyuluhan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk membantu para penyuluh menyebarkan paket teknologi pertanian dari sub sistem hulu *on farm* hingga sub sistem hilir dan sebagai media forum komunikasi”. Fasilitasi dokumentasi juga dapat menampung masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para penyuluh.

Fasilitasi dalam KMS melalui *Knowledge Management Process*, meliputi: (i). Proses penjelasan (*Acquisition*), pengumpulan data dan informasi penyuluhan pertanian yang akan diolah menjadi sebuah *knowledge*. (ii). *Refinement*, proses pengolahan data dan informasi penyuluhan pertanian yang sudah dikumpulkan sehingga memungkinkan suatu *knowledge* dapat diciptakan, (iii). *Storage/retrieval*, proses untuk menyimpan dan memberi *index knowledge* yang sudah diciptakan. Sebagai contoh proses *storage* adalah dimana seorang moderator yang membagi suatu *knowledge* dalam sistem *help desk*, (iv). *Distribution*, proses untuk mendistribusikan *knowledge* yang sudah diciptakan dan disimpan. (v). *Presentation*, proses untuk menampilkan *knowledge* yang sudah ada, contoh proses *presentation* adalah melalui sistem *help desk* dan forum diskusi.

Responsibility, sistem *help desk* ini membantu mempercepat penyebaran informasi dan *knowledge*. Sistem *help desk* ini juga membantu memenuhi kebutuhan informasi dan *knowledge* yang dibutuhkan oleh para penyuluh mengenai pertanian khususnya subsektor tanaman pangan guna mendukung kegiatan penyuluhan yang dilakukan.

Menurut Turban, (2010), *knowledge management melalui enam siklus (knowledge management cycle)*, yaitu : (1). *Create knowledge*; (2). *Capture knowledge*, (3). *Refine knowledge* (4) *Store knowledge*, *knowledge* yang melalui tahap *refine* kemudian akan disimpan dalam media penyimpanan berbentuk *website* (5) *Manage knowledge*, dan (6). *Disseminate knowledge*.

Penerapan enam siklus manajemen pengetahuan untuk penyuluhan masyarakat bagi PSM sesuai konsepsi Turban, dapat disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Enam Siklus Manajemen Pengetahuan Bidang Penyuluhan Masyarakat Bagi PSM

No	KM Cycle	Pengetahuan Penyuluhan
1	<i>Create Knowledge</i>	Penciptaan pengetahuan tentang penyuluhan masyarakat melalui diskusi, rapat, sharing, antar PSM dan mitra penggerak swadaya masyarakat
2	<i>Capture Knowledge</i>	<i>Knowledge management team</i> bertugas mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan tentang penyuluhan masyarakat yang dianggap berguna,
3	<i>Refine knowledge</i>	Penyaringan (<i>refine</i>), seberapa baik kualitas <i>tacit knowledge</i> penyuluhan yang dimiliki oleh seorang PSM yang ditangkap bersama dengan <i>explicit knowledge</i> .
4	<i>Store knowledge</i>	Setelah pengetahuan penyuluhan melalui tahap penyaringan kemudian akan disimpan dalam media penyimpanan berbentuk <i>website</i> , dapat diakses setiap pengguna pergerakan swadaya masyarakat
5	<i>Manage knowledge</i>	Secara periodik mengklasifikasi dan pembaruan (<i>updating</i>) pengetahuan penyuluhan masyarakat yang relevan, sesuai kondisi dan kebutuhan.
6	<i>Disseminate knowledge</i>	<i>KM Team</i> mendiseminasikan/ menyosialisasikan KMS yang telah dirancang agar memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyuluhan, dan kegiatan pergerakan swadaya masyarakat desa.

Sumber : Diadopsi dari konsep *Knowledge Management Cycle*, Turban (2010)

Pihak yang terlibat dalam proses penciptaan pengetahuan penyuluhan masyarakat adalah PSM, penyuluh pertanian, penyuluh , petugas penyuluh lainnya, kader agen perubahan daerah sampai tingkat desa untuk menciptakan *knowledge* berupa pemahaman tentang masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan dapat dilakukan di lapangan, untuk kemudian disalurkan kepada organisasi, dalam hal ini Kementerian Desa, PDTT sebagai Pembina jabatan PSM.

Pada tahap penyaringan, pengetahuan penyuluhan dapat bersifat umum dan berupa ketentuan akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. sehingga informasi yang disajikan relevan

Ghani (2009) mengutarakan *tools* yang dapat digunakan dalam implementasi *knowledge management system*. Pada Tabel 5 berikut dapat dilihat instrumen alat (*tools*) pada setiap jenis *knowledge*.

Tabel 5. *Knowledge Management Tools* Untuk Mengimplementasikan KMS

<i>Explicit Knowledge</i>	<i>Know How</i>	<i>Know Who</i>	<i>Tacit Knowledge</i>
<i>System tools</i>	<i>Collaborative Tools</i>	<i>Customer Relation Management (CRM) Tools</i>	<i>Video Conferencing</i>
Sistem Manajemen Basis Data (<i>Data Base Managment Systems /DBMS</i>)	Analisis Jejaring Sosial (<i>Social Network Analysis</i>)	<i>Social Network Analysis</i>	Fasilitasi tatap muka (<i>Face to Face Facilitation</i>)
Penyimpanan Data (<i>Data Warehousing</i>)	Gerbang/ Portal Pengetahuan (<i>Knowledge Portals</i>)	<i>Knowledge Portals</i>	<i>Other Technologies</i>

Sumber : *Knowledge Management Tools* S.R. Gani (2009)

Pada tabel di atas terlihat berbagai instrument (*tools*) yang dapat digunakan memfasilitasi pengetahuan dalam rangka mengimplementasi KMS. Tools termasuk teknologi untuk memfasilitasi pengembangan KMS penyuluhan masyarakat yang perlu disesuaikan dengan pesatnya perkembangan teknologi bidang TI dan komunikasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengembangan KMS bidang penyuluhan masyarakat sebagai satu solusi meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok PSM dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat membantu perwujudan desa maju dan mandiri yang diprioritaskan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Disain atau rancangan KMS dikaji dan ditelaah melalui studi literatur terkait perkembangan teori, konsep, teknologi yang mendukung pengembangan KMS.

Saran

Kajian perancangan KMS ini masih terbatas pada kegiatan penyuluhan, yang merupakan Sebagian tugas utama PSM dalam melaksanakan penggerakan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilanjutkan penelitian lebih lanjut terkait tugas PSM bidang pendampingan dan pelatihan masyarakat.

Jabatan PSM merupakan jabatan baru sehingga belum banyak pengetahuan atau pengalaman yang terinternalisasi dalam bentuk tacit maupun *explicit knowledge* menyangkut penyuluhan masyarakat. Disarankan agar observasi lapangan dari PSM dapat diperoleh pengetahuan dan pengalaman baru untuk memperkaya dan menyempurnakan rancangan KMS yang sesuai bagi PSM.

DAFTAR PUSTAKA

Anardani, Sri & Slamet Riyanto & Dimas Setiawan. 2021. Perancangan KMS Berbasis Web Pada Tenaga

Kependidikan Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, Vol.8, No. 1, hlm. 77-84.

Assa H.R, R.L. Rengkung R.L., Rengkung, Pakasi D.B. Caroline. 2017. Knowledge Management Pada Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Tombasian Atas, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Volume 13 Nomor 3A, November 2017 271 - 282

Andrawina, Luciana & Amelia Kurniawati & Umar Yunan. 2014. Rancangan Framework Knowledge Management Systems untuk Pengelolaan Parkir Berdasarkan Knowledge Management Triad. *Jurnal Rekayasa Sistem & Industri* Vol.1 No. 1, Juli, 2014. Hal 173-177.

Al-Gharibeh, K.M. 2011. The Knowledge Enablers of Knowledge Transfer: An Empirical Study in Telecommunications Companies. *Journal of IBIMA Business Review*. Vol 2011 (2011), Page. 1-13)

Cresswell John W. 2016. Research Design Penelitian Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat (Cetakan kesatu), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Hidayat, Rahmad & Silmi Fauziati & Eko Nugroho. 2019. Perancangan Knowledge Management System di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains ISBN: 978-602-52720-1-1 SAINTEKS 2019 Januari 2019 Hal: 813 - 821

Harisno dan Freddy Jingga. 2011. Manajemen Penyuluhan Pertanian dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyuluhan Pertanian: Help Desk Penyuluhan Pertanian Komoditas Tanaman Pangan. *ComTech* Vol.2 No. 1 Juni 2011: 373-383

Hanafie, N.E. 2020. Evaluasi Optimalisasi Peran dan Fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat. *Jurnal Administrasi*

Pendidikan, Volume 27 Issue 1, April
2020 Hal 33-41

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pusat Pelatihan Pegawai ASN (2021). Laporan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2020 Tentang Standard dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi No.28/2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press, USA.
- Sutarto, J. & Mulyono. 2018. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35(1),27–40. <https://doi.org/10.15294/jpp.v35i1.15091>
- S. R. Ghani. 2009. Knowledge Management: Tools and Techniques, *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, vol. 29, no. 6, pp. 33-38..
- Turban, Efraim & Volonino, Linda.2010. *Information Technology for Management*. Seventh Edition. Wiley Plus.